

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ETNIS CINA

A. Konsep Integrasi di Indonesia

A.1 Definisi Konsep Asimilasi

Bhineka Tunggal Ika merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Integrasi dilakukan oleh pemerintah agar perbedaan yang ada dalam etnis yang berbeda-beda tidak menimbulkan suatu konflik.

Integrasi adalah suatu proses percampuran etnis Cina ke dalam bangsa Indonesia tanpa meninggalkan budaya asalnya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, integrasi ini lebih tepat sebagai "Penggabungan" etnis Cina ke dalam bangsa Indonesia, sebagai "suku baru" lengkap dengan budayanya.¹

Proses percampuran orang Cina ke dalam bangsa Indonesia dipengaruhi oleh situasi kondisi tempat mereka tinggal. Secara politis, kemudian muncul istilah integrasi dan asimilasi pada awal tahun 1960-an. Pada masa Orde Baru, pembicaraan masalah tersebut ditabukan. Semuanya digiring untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang berkuasa.

Seperti diketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Untuk mempersatukannya, konsep asimilasi diterapkan di Indonesia sebagai proses integrasi. Dengan demikian, konsep integrasi di

¹ Indonesia Media, "Integrasi vs Asimilasi,"
<http://www.indonesiamedia.com/rubrik/opini/opini00october.htm>

dlakses tanggal 2 Juni 2007

Indonesia adalah asimilasi. Jadi, asimilasi secara konseptual, merupakan peleburan identitas etnis individu dalam arti etnis yang dimilikinya tidak dapat diaktualisasikan dimuka umum karena individu tersebut harus mengikuti budaya nasional yang ada.²

A.2 Definisi Operasional

Paham integrasi diperjuangkan oleh Baperki pada masa pemerintahan Bung Karno. Integrasi atau penggabungan pada waktu itu dianggap sebagai proses yang terbaik yang di klaim dapat diterima oleh semua orang Cina di Indonesia. Meskipun sebenarnya, tidak semua orang Cina menyetujui dengan paham integrasi tersebut. Namun sebaliknya, situasi dan kondisi di setiap daerah, tidak semuanya dapat menerima proses integrasi.

Penerapan asimilasi di Indonesia dilakukan sebagai berikut:

- a. Perubahan identitas orang Cina menjadi Indonesia, yaitu dalam hal nama.**

Berawal dari ide Bung Karno yang menyebutkan "suku Cina" dalam sambutannya pada Kongres Nasional ke-8 BAPERKI di Jakarta tanggal 14 Maret 1963, muncullah tuntutan untuk diakui sebagai "suku Cina" yang sejajar dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Ide suku Cina ini yang sejalan dengan paham integrasi, kemudian diambil alih oleh Baperki di bawah pimpinan Siauw Giok Tjhan. Masalah "suku Cina" sendiri telah menimbulkan perdebatan

² *Ibid.*

yang luas antara pihak yang pro dan kontra, baik di kalangan etnis Cina sendiri maupun di kalangan suku-suku asli yang ada di Indonesia.³

Di antara pihak yang tidak menyetujui dengan paham integrasi tersebut, salah seorang di antaranya adalah Yap Thiam Hien yang menjabat sebagai Wakil Ketua Baperki sampai dengan tahun 1960. Setelah keluar dari Baperki, Yap bersama dengan beberapa orang rekannya membentuk LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) pada tahun 1961 dan memperkenalkan paham "asimilasi" dalam proses percampuran etnis Cina ke dalam bangsa Indonesia.

Dalam pandangan paham asimilasi, untuk menjadi orang Indonesia, orang Cina harus dilebur ke dalam penduduk Indonesia asli sehingga kaum minoritas Cina tidak lagi akan menjadi suatu kelompok tersendiri. Paham ini mendapat tentangan keras dari Baperki dengan paham integrasinya. Selama masa pemerintahan Bung Karno, dapat dikatakan bahwa paham asimilasi kalah pengaruh dengan paham integrasi.

Secara operasional, konsep asimilasi di Indonesia adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara

³ Pikiran Rakyat, "Krisis dan Strategi Kebudayaan Baru," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0105/10/0803.htm>, diakses tanggal 3 Juli 2007.

orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.⁴

Hasil dari proses asimilasi adalah semakin tipisnya batas perbedaan antarindividu dalam suatu kelompok, atau dapat juga batas-batas antarkelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula halnya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.⁵

b. Perubahan identitas orang Cina menjadi Indonesia, yaitu dalam hal agama karena pemerintah Indonesia hanya mengakui lima agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Baperki akhirnya dibubarkan dan paham integrasi tidak terdengar lagi gaungnya dan yang menonjol adalah paham asimilasi. Namun kemudian, paham asimilasi ini diambil alih oleh pemerintah Orba untuk kepentingan politiknya dan sudah menyimpang dari tujuan semula. Salah satu diantaranya adalah anjuran untuk berganti nama yang cenderung dipaksakan serta tidak mengakui agama Konghucu.

⁴ Wikipedia, "Asimilasi," [http://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_\(sosial\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial)), diakses tanggal 1 Juli 2007.

⁵ *Ibid.*

c. Dilarang melaksanakan kegiatan ibadah agama mereka yaitu Konghucu dan tidak diperbolehkan berbahasa Cina.

Para pencetus paham asimilasi, kemudian satu persatu mengundurkan diri dari LPKB dan akhirnya LPKB dibubarkan pemerintah. Karena melihat segi positif dari LPKB, dengan diprakarsai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974 dibentuk badan baru yang dinamakan Badan Pembina Kesatuan Bangsa DKI yang mirip dengan LPKB. Di antara empat belas orang pengurusnya, empat di antaranya adalah orang Cina yang salah satu diantaranya bekas pemimpin LPKB. Badan ini, kemudian, diambil alih pula oleh pemerintah Orba dan diganti namanya menjadi Badan Komunikasi Pembinaan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) sampai sekarang.

Paham asimilasi, kemudian, dimodifikasi sedemikian rupa oleh pemerintah Orba, sehingga cenderung ke arah pemaksaan kawin campur dan pindah agama. Paham asimilasi yang semula merupakan ide "Pembauran" ke dalam bangsa Indonesia secara operasional telah berubah menjadi proses "Peleburan" ke dalam bangsa Indonesia dengan menghapus segala sesuatu yang bercirikan ke-Cina-an. Proses ini, ternyata, telah gagal total dan bahkan telah menimbulkan kristalisasi masyarakat Cina dengan berbagai eksisnya. Contohnya, adalah orang Cina tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Cina

secara formal dan dalam kesehariannya dilarang melaksanakan kegiatan ibadah agama mereka Konghucu.

B. Kronologi Etnis Cina di Indonesia

Secara kronologis, awal kedatangan etnis Cina ke Indonesia ditandai dengan peperangan antara laskar Mongol Kubilai Khan melawan Raden Wijaya. Namun, karena menderita kekalahan, mereka akhirnya menetap di wilayah Majapahit serta ikut mendukungnya melalui transfer pengetahuan tentang mesiu, maritim, dan perdagangan.⁶

Sekitar seratus tahun kemudian, Laksamana Cheng Ho diutus oleh Kaisar Yong Le untuk melakukan kunjungan persahabatan ke berbagai tempat di Nusantara. Satu abad kemudian datang Bong Swie Hoo dan menetap di Ampel, membentuk masyarakat Islam Jawa di pesisir utara Jawa dan Pulau Madura sehingga dia dikenal sebagai Sunan Ampel.

Dapat dikatakan bahwa orang-orang Cina telah hidup damai sejak lama dan membaur dengan penduduk Indonesia, bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mereka, bahkan, menikahi perempuan "pribumi" yang menghasilkan keturunan campuran. Sayangnya, harmoni ini dirusak oleh Belanda dengan menerapkan *passenstelsel*, yaitu surat jalan khusus bagi etnis Cina jika hendak bepergian ke luar distrik, tempat tinggal mereka. Selain itu, Belanda juga menerapkan *wijkenstelsel* yang melarang etnis Cina bertempat tinggal di kota dan mengharuskan mereka membangun pecinan.

⁶ Kholidas, "Peran Katalisator Cina Muslim," <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/03/12/0031.html>, diakses tanggal 4 April 2007.

Kebijakan Belanda ini mengakibatkan imigran Cina tidak lagi didominasi orang muslim, bahkan didatangkan Belanda yang nonmuslim untuk memenuhi kebutuhan kolonialisasi. Ditambah dengan politik *divide et impera* Belanda, terbentanglelah jarak antara penduduk Cina dengan pribumi. Mereka semakin "asing", lengkap dengan segala stereotip negatifnya, sehingga peran islamisasinya menjadi buram.⁷

Fakta ini diperparah lagi dengan adanya penulisan sejarah Indonesia yang cenderung *Nerlando-Java centris*, sehingga semakin terkucillah etnis Cina. Terlebih lagi dengan kebijakan diskriminatif Orde Baru, maka semakin lengkaplah kesuraman "eksistensi" etnis Cina di Indonesia. Sampai saat ini, memang belum pernah ada pengakuan "resmi" tentang peran Cina dalam sejarah penyebaran Islam ke Nusantara. Sejak dahulu, yang diajarkan dalam buku-buku sejarah sekolah adalah teori Arab dan India (Gujarat). Sementara buku yang berusaha mengangkat peran Cina, seperti Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara (1968) karya Slamet Muljana pada tahun 1971, justru, diberedel karena alasan "berpotensi" mengganggu stabilitas. Padahal dalam buku ini, yang diterbitkan kembali tahun 2005 dan diperkuat oleh Sumanto al-Qurtuby⁸, serta Benny G. Setiono⁹, dijelaskan bahwa islamisasi Nusantara tidak terlepas dari andil Cina.

⁷ Indonesia Media, "Kegagalan Doktrin Asimilasi," <http://www.indonesiamedia.com/2005/10/early/sejarah/kegagalan%20doktrinas%20asimilasi.htm>, diakses tanggal 4 Mei 2007.

⁸ Sumanto al-Qurtuby, "Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah atas Peranan Cina Dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI" Yogyakarta: Read Book, 2003.

⁹ Benny G. Setiono, "Cina dalam Pusaran Politik," Yogyakarta: Read Book, 2003.

C. Penerapan Asimilasi Di Indonesia

C.1. Di Bidang Ekonomi dan Politik.

Pada saat Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, aktivitas yang dilakukan Soekarno di bidang ekonomi terhadap etnis Cina adalah sistem ekonomi banteng dan mengeluarkan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1959. Motivasi kedatangan orang Cina ke Asia Tenggara beragam faktor pendorong, seperti: bencana kelaparan, politik, dan faktor peluang berusaha di tempat yang baru merupakan faktor-faktor yang bertumpang tindih saling memperkuat antara yang satu dengan yang lain. Sisa-sisa permukiman kota prakolonial merefleksikan keharmonisan multikultural di Indonesia, mulai dari Malaka hingga Semarang. Saat ini, masih dapat ditemukan kelenteng tua bersanding dengan masjid kuno. Sam Po Tay Jin di Semarang dikunjungi tidak hanya oleh orang-orang Cina, tetapi juga orang-orang Jawa yang menghormati Sam Po Kong atau Cheng Ho (atau Zheng He), nahkoda Dinasti Ming yang beragama Islam (berdakwah di Nusantara pada 1406-1433). Di kawasan Pasar Lama Tangerang dapat disaksikan masjid yang dibangun sekitar abad ke-18. Menara masjid berkarakter "pagoda" itu melambangkan keharmonisan antaretnis, budaya, agama karena mesjid itu dibangun oleh arsitek yang didatangkan dari Tiongkok dan yang juga membangun kelenteng dan ruko di Pasar Lama

Tangerang tersebut. Tidak terhitung lagi contoh akulturasi di Indonesia karena hal semacam ini begitu merakyat.¹⁰

Pada masa kolonial, pecinan merupakan bagian politik segregasi etnis (Belanda membagi masyarakat di Hindia Belanda ke dalam tiga strata: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi) yang telah dijalankan sejak 1672 dengan pemberlakuan sistem *officieren* (sistem pejabat). Kemudian disusul pemberlakuan sistem *wijkenstelsel* (pembatasan permukiman, 1841-1915), *passenstelsel* (sistem pas jalan, 1863), berbagai perlakuan hukum dan sosial, hingga aturan dalam penampilan pribadi (pakaian dan potongan rambut). Semua itu mengakibatkan asimilasi, yang sebelumnya terjadi secara alamiah menjadi terhenti.

Posisi masyarakat Cina ditempatkan di tengah-tengah sistem eksploitasi kolonial, sehingga tercipta kecemburuan dan kemarahan golongan pribumi yang merasa dieksploitasi. Para pejabat Cina yang dirangkul Belanda menempatkan diri mereka sebagai kaum Eropa dengan gaya hidup elite. Pecinan, di kota-kota pedalaman Jawa, juga berkembang pesat pada periode ekspansi kolonial Belanda abad ke-19. Seiring dengan berbagai modernisasi, pemerintah kolonial membuka kota-kota ini dalam rangkaian tujuan memperluas jalur distribusi hasil bumi, memperoleh lingkungan tempat tinggal yang nyaman, dan mengembangkan sistem pengawasan militer.¹¹

¹⁰ Setiadi Sopandi, "Etnis Cina," <http://www.arsitekturindis.com/index.php/archives/2001/02/page/2/>, diakses tanggal 5 April 2007.

¹¹ *Ibid.*

Kota-kota Indis bermunculan di daerah perbukitan yang nyaman. Di kota-kota pedalaman, mereka juga mulai mendirikan ruko dan tempat tinggal yang bergaya Eropa sesuai dengan trend di kota-kota tersebut. Kita dapat menemukan rumah besar berkarakter arsitektur Cina Selatan sebagai perwujudan sistem *officieren*. Juga lazim dijumpai, di antara ruko padat di pecinan, muncul bangunan bertipologi dan bergaya Eropa. Pemilik-pemiliknya adalah etnis Cina kaya yang terpanggil menciptakan citra kecinaannya kembali atau juga berusaha menciptakan citra modern dan sejajar dengan kaum kolonial (menunjukkan mobilitas status sosialnya).

Sebenarnya, pecinan terbentuk dari struktur sederhana, pragmatis dan praktis; yaitu ruko (rumah-toko) sederhana. Struktur inilah yang memenuhi sebagian besar komposisi perkotaan, struktur biasa atau awam, yang merupakan hunian rakyat kebanyakan. Ironisnya justru karena kebersahajaannya, bangunan tersebut tidak mendapatkan perhatian besar karena bentuk dan kualitas visualnya dipandang tidak “indah” (terlebih jika dibandingkan dengan bangunan Belanda dan rumah orang kaya baru masa kini. Apalagi, bila diukur dengan selera masyarakat yang memuja kebaruan, pertumbuhan, dan perkembangan). Bahkan, di kantong-kantong itu, di balik jalan utama pecinan, ternyata ditemukan banyak terjadi percampuran etnis dalam komunitas ini. Mereka cenderung terkelompokkan dalam golongan tingkat ekonomi daripada etnisitas. Bukti nyata asimilasi adalah bentuk kompromistis inilah, yang sebenarnya perwujudan nyata jiwa pragmatis, akomodatif, dinamis, dan praktis dari penghuninya. Ruko ini merupakan

elemen pewujud jiwa tempat (*genius loci*) yang dibentuk pragmatisme kaum biasa yang tidak dapat direkayasa citranya. Dalam keseharian, lewat aktivitas perdagangan khususnya, masyarakat tidak lagi terkotak tegas secara etnis, tetapi membaur dalam simbiose.

Gelombang migrasi orang-orang etnis Cina secara individual dari daratan Cina ke berbagai pelosok wilayah di seluruh Indonesia , telah berlangsung lama dan itu terjadi jauh sebelum kesatangan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Pemisahan penduduk selama tiga setengah abad penjajahan Belanda berhasil membangun strata masyarakat secara rasial dan primordial yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan politik. Kaum Belanda dan priayi menjadi penguasa, masyarakat etnis Cina menjadi masyarakat menengah yang bergerak di bidang perdagangan saja, dan bagian yang terbesar rakyat jelata menjadi kawula yang senantiasa tertindas. Kesenjangan ekonomi dan politik merupakan kenyataan dalam situasi tersebut.

Keberadaan sistem ekonomi benteng menyebabkan hampir setiap kota, di Indonesia, memiliki pecinan yang berfungsi sebagai sentra ekonomi dan hunian. Sebagai komponen perkotaan yang unik dari segi etnisitas, fungsi, dan latar belakang sejarah, pecinan menyimpan banyak keunikan potensi dan masalah, baik dalam aspek perkotaan, arsitektur, dan sosial budaya yang jalin-menjalin. Namun, pecinan juga menyimpan aset budaya penting yang dapat “mengingat” bangsa Indonesia bahwa budaya dan etnis bukanlah kotak yang statis. Budaya dan etnisitas, seiring dengan kontak

individu lewat kegiatan sehari-hari dan perjuangan, adalah hal yang dinamis, penetratif, tanpa *embel-embel* agresi dan pemaksaan. Meskipun banyak keraguan dalam menentukan keberadaan pecinan pada masa prakolonial, berbagai bukti dan catatan sejarah membuktikan keberadaan dan kemapanan komunitas Cina di Indonesia.

Sebagai masyarakat perantauan, memang, etnis Cina memiliki kekuatan yang cukup besar, baik dari segi jumlah maupun dari segi peran. Hanya saja, etnis Cina selalu ditempatkan dalam posisi mengambang, baik dari segi hukum maupun kehidupan sosial. Mereka menjadi masyarakat yang identitasnya selalu dibuat tidak mengakar. Sejak zaman VOC, kehidupan sosial orang-orang Cina, di Hindia Belanda, telah sangat dibatasi. Setiap usaha pembauran tidak hanya dicurigai, tetapi juga dicegah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dan ancaman hukuman yang luar biasa beratnya.

Sejak zaman VOC, etnis Cina selalu dijadikan "target operasi" konflik politik. Bahkan, ketika bangsa Indonesia sudah merdeka dan merumuskan cita-cita perjuangannya dalam wadah Pancasila yang egaliter dan jauh dari sentimen etnis itu, etnis Cina juga selalu menjadi *tumbal* kekuasaan.

Selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, tidak sedikit orang Cina yang membantu perjuangan bangsa, merebut kemerdekaan. Tidak hanya pengorbanan materi, tetapi perlawanan paling tragis tercatat pada tahun 1740 ketika dua per tiga penduduk etnis Cina Batavia, atau sekitar sepuluh ribu

orang tewas mengenaskan, akibat melawan Belanda. Begitu pula di zaman Jepang, tidak sedikit orang Cina yang gugur sebagai pahlawan.

Namun, realitanya pada masa Presiden Soekarno, etnis Cina sering dijadikan kambing hitam. Minoritas etnis Cina dicap eksklusif, tidak mau berbaur, tahunya hanya berdagang, tidak memiliki jiwa nasionalisme, tidak peduli terhadap nasib bangsa, dan sebagainya. Labelisasi itu tentu tidak sepenuhnya tepat. Seharusnya, pemerintah melakukan introspeksi. Kebijakan politik diskriminasi, sedikit banyak, membuat WNI keturunan merasa sebagai warga kelas dua, kendati mereka sudah tidak memiliki keterkaitan emosional dengan budaya leluhurnya di Cina daratan.

Peristiwa yang menyedihkan dan sekaligus yang mengerikan atas etnis Cina adalah pembunuhan massal pada tahun 1946 di Banten, penyunatan massal para lelaki dewasa, dan pemerkosaan para perempuan Cina. "Ribuan orang Cina tewas dalam serangan itu, yang besar kemungkinan juga disulut oleh rasa sentimen ekonomi. Peristiwa ini semakin meningkatkan suatu proses terwujudnya kelompok minoritas.

Ketika Indonesia sudah merdeka, diskriminasi terhadap masyarakat Cina tidak mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959. Presiden Soekarno melarang hampir semua bentuk perdagangan eceran di daerah pedalaman yang berada di tangan orang-orang Cina. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak saja membatasi pembauran, tetapi juga mengesampingkan kedudukan masyarakat Cina dalam kehidupan sosial desa.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, berkembang dua doktrin dalam konteks *nation building* yang menyangkut penyelesaian masalah minoritas etnis Cina di Indonesia. Doktrin yang pertama adalah doktrin integrasi yang dikembangkan oleh Baperki di bawah pimpinan Siauw Giok Tjhan, yaitu sebuah doktrin yang ingin membangun sebuah *nation* atau bangsa yang bersih dari diskriminasi rasial serta kesamaan hak dan kewajiban warga negaranya tanpa mempermasalahkan asal-usulnya dan mengintegrasikan etnis Cina secara utuh ke dalam bangsa Indonesia.

Doktrin integrasi meyakini kebenaran konsep kemajemukan atau pluralisme bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan para *founding fathers* bangsa Indonesia dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang diambil dari kalimat yang ditulis Empu Tantular dalam bahasa Sansekerta. Adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis/ras dan agama dengan budayanya masing-masing. Selanjutnya doktrin tersebut berpendapat *nation* yang bersih dari diskriminasi rasial hanya dapat terwujud di dalam masyarakat sosialis yang bersih dari penghisapan manusia atas manusia atau golongan mayoritas terhadap golongan minoritas dan atau sebaliknya.

Mengenai *nation building*, Presiden Soekarno dalam pidatonya pada Pembukaan Kongres Nasional ke-8 Baperki di Istana Olah Raga Bung Karno (sekarang Istora Senayan) pada 14 Maret 1963, menyatakan antara lain :

“.....Tujuan dari revolusi Indonesia adalah *nation building*, bukan di dalam arti yang sempit sekedar membentuk satu *nation* Indonesia. Tidak, lebih dari itu pula, *nation* Indonesia yang bahagia, yang hidup di dalam satu masyarakat adil dan makmur tanpa

exploitation de l'homme par l'homme. Nation building dalam arti yang seluas-luasnya.....Dan saya tidak mau mengenal minoritas di Indonesia. Di Indonesia kita hanya mengenal suku-suku. Saya tidak akan berkata, suku itu adalah minoritas, suku itu adalah minoritas, suku Dayak adalah minoritas, suku Irian Barat adalah minoritas, suku yang ada di Sumatera Selatan itu suku Kubu- adalah minoritas,suku Cina adalah minoritas, tidak ! Tidak ada minoritas, hanya ada suku-suku, sebab manakala ada minoritas, ada mayoritas. Dan biasanya kalau ada mayoritas, dia lantas exploitation de la minorite par la majorite, exploitatie dari minoriteit majoriteit...."¹²

Menurut Siauw Giok Tjhan, etnis Cina harus diterima apa adanya dan tidak perlu membuang seluruh identitas, nama, agama dan tradisinya, apalagi sampai harus meleburkan seluruh ciri-ciri biologis dan fisiknya agar dapat diterima sebagai bangsa Indonesia karena hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia. Untuk diterima menjadi bangsa Indonesia, etnis Cina harus menerjunkan diri dalam perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai masyarakat sosialis yang adil dan makmur. Etnis Cina harus selalu peduli dan membuktikan sumbangsuhnya kepada perjuangan bangsa dan negara serta menunjukkan sikap empati kepada penderitaan bangsa dan rakyat Indonesia.

Doktrin yang kedua adalah doktrin asimilasi total yang dikembangkan oleh sekelompok peranakan Cina yang tidak menyetujui doktrin integrasi. Untuk itu, pada tanggal 24 Maret 1960 di Jakarta, dikeluarkan suatu "statement asimilasi" yang dengan tegas berpendirian bahwa masalah minoritas hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi dalam segala aspek secara aktif dan bebas. Para penandatangan statement tersebut adalah sepuluh

¹² Indonesia Media, "Kegagalan Doktrin Asimilasi," <http://www.indonesiamedia.com/2005/10/early/sejarah/kegagalan%20doktrinasi%20asimilasi.htm>, diakses tanggal 4 Mei 2007.

orang tokoh peranakan Cina, yang beberapa orang di antaranya malah ikut mendirikan Baperki, namun telah meninggalkannya pada tahun 1955. Di antaranya adalah Injo Beng Goat, Auwjong Peng Koen (P.K.Ojong), Lauwchuantu (H.Junus Jahja), dan Ong Hok Ham.

Rezim Soeharto dalam bidang ekonomi, melaksanakan konsep *trickle down effect*, merupakan usaha akselerasi para pengusaha besar untuk kemudian meneteskan kemakmuran kepada rakyat, ternyata, tidak disertai dengan prinsip *taxation* (pungutan pajak) yang keras. Selain itu, hukum juga tidak ditegakkan dengan benar. Perlakuan terhadap etnis tertentu, termasuk Cina, sangat diskriminatif. Kebalikan dengan Malaysia yang sangat propribumi, Soeharto justru menciptakan mekanisme *patron-klien* antara penguasa dengan pengusaha etnis Cina yang menjadi bibit tersemainya kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) dan memarginalkan kaum pribumi secara ekonomi.¹³

Di sisi lain, semasa pemerintahan Presiden Soeharto, secara kultural warga keturunan etnis Cina tidak mendapatkan ruang ekspresi yang luas. Mendekati akhir masa pemerintahannya, barulah simbol-simbol kultural tersebut dapat muncul ke permukaan. Artinya, kebijakan ekonomi dan politik Orde Baru semata dilakukan demi kepentingan penguasa. Rezim otoritarian itu dimunculkan untuk menghambat suara-suara kritis yang dianggap akan menghambat aliran kepentingan penguasa dan segelintir kelompok tertentu.¹⁴

¹³ Pikiran Rakyat, "Mahathir dan "Role Model" Kepemimpinan Asia," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/28/0801.htm>, diakses tanggal 3 April 2007.

¹⁴ *Ibid.*

Pemerintah, selanjutnya, melarang penggunaan simbol-simbol Cina, baik berupa surat kabar maupun penggunaan bahasa Cina dimuka umum. Pada tahun itu pula, dikeluarkan peraturan untuk tidak menggunakan nama 'Cina' karena konotasi keterkaitannya dengan 'tiongkok' negeri leluhur ras ini. Untuk meredam konflik lebih besar, pemerintah Orde Baru memandang orang-orang Cina yang menjadi WNI sebagai warga yang berhak dan berkewajiban sama dengan pribumi, dan menganjurkan agar WNI keturunan Cina dapat "membuka kran" usahanya bersama dengan orang pribumi. Memang, usaha-usaha yang selama ini menjadi monopoli orang-orang Cina, kemudian mulai diisi dengan orang-orang pribumi. Kerjasama tersebut saling menguntungkan kedua pihak, dan umumnya, lebih banyak terjadi kerjasama antara pejabat pemerintah dengan pengusaha Cina.¹⁵

Di sinilah mulai ada tuduhan kolusi (KKN) antara pejabat dan WNI keturunan Cina yang, kemudian, menghasilkan ekonomi pertumbuhan gaya orde baru yang memang hebat, tetapi menghasilkan produk sampingan berupa kesenjangan sosial-ekonomi yang makin lebar antara beberapa pengusaha Cina dan pejabat pribumi dengan rakyat pada umumnya. Namun, dibalik hal tersebut dalam kehidupan Orde Baru, sebenarnya banyak generasi muda Cina mulai bersosialisasi dan berintegrasi dengan pribumi dan makin banyak pula, kemudian, yang melakukan kawin-campur dengan pribumi, terutama yang beragama sama.

¹⁵ *Ibid.*

Pertumbuhan ekonomi gaya Orde Baru, memang, cenderung bersifat pasar bebas. Pemodal besar diuntungkan dan jelas bersifat kapitalistis. Ternyata, pertumbuhan ekonomi Orba lebih membuka peluang pertumbuhan sektor ekonomi makro dan menghasilkan konglomerat-konglomerat yang sebagian besar dari etnis Cina. Apalagi, Presiden Soeharto mempunyai hubungan dekat dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Pemerintah secara terbuka lebih memberikan kebebasan dalam perkembangan usaha-usaha konglomerasi demikian, bahkan oleh pihak tertentu pengusaha Cina itu dijadikan "sapi perahan".

Sektor mikro seperti Koperasi umumnya dimasuki pedagang pribumi. Karena kekurangan pengalaman dan keunggulan dalam sektor perdagangan, dapat dimaklumi, kalau usaha konglomerasi yang melibatkan mayoritas Cina lebih unggul dan berkembang dan usaha Koperasi makin terpuruk. Banyak usaha koperasi hancur, dan pamor industri batik rakyat tradisional yang sempat jaya, bahkan hancur diterjang usaha-usaha nonpri yang mendirikan pabrik batik raksasa seperti Batik Keris dan Batik Semarang.

Sektor pasar tradisional dan pedagang asongan nonformal yang umumnya dikuasai pribumi "dihantui supermal-supermal" yang dimiliki nonpri, seperti jaringan supermal Matahari yang juga merambah kota-kota kabupaten dan kecamatan. Jelas, perbedaan demikian, menimbulkan kesenjangan sosial yang makin parah yang menjurus pada terjadinya kerusuhan-kerusuhan dan huru-hara kota yang cenderung menjadikan rumah, toko, pabrik, ataupun supermal milik nonpri menjadi sasaran amuk massa.

Hampir semua sektor perdagangan terutama perbankan, sekarang, dikuasai oleh nonpri atau kolusi pri-nonpri. Itulah sebabnya, dalam setiap amuk yang melibatkan massa, selalu mengarah pada pengrusakan, yang akan kembali mengarah pada minoritas ini.

Tidak dapat diingkari pengaruh SCUT dan tokoh-tokoh LPKB mendorong kelahiran Inpres No.14/1967 ini. K.Sindhunatha mengakui secara gamblang bahwa ia yang mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar seluruh tradisi, adat-istiadat, kepercayaan dan agama etnis Cina dilarang di Indonesia. Ia menambahkan bahwa Presiden Soeharto masih cukup baik karena masih mengijinkan etnis Cina merayakannya di lingkungan keluarga dan di dalam ruangan tertutup (*indoor*). Padahal, usul yang diajukannya melarangnya secara total. Dengan dikeluarkannya Inpres No.14/1967 itu seluruh perayaan tradisi dan keagamaan etnis Cina termasuk Tahun Baru Imlek, Capgomeh, Pehcun dan sebagainya dilarang dirayakan secara terbuka. Demikian juga tarian-tarian barongsay (tari singa) dan liang-liong (tari naga) dilarang dipertunjukkan di muka umum.

Pemasangan terhadap etnis Cina, kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4555.2-360 tahun 1968 tentang Penataan Kelenteng dan Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan beraksara dan berbahasa Cina, ditambah dengan Peraturan Daerah Tingkat I DKI Jakarta No.K-I/OS-12 tentang keharusan warga negara Indonesia keturunan Cina di daerah DKI Jakarta melapor dan mengisi

formulir K-1. Demikian juga setiap warga negara Indonesia keturunan Cina dan anak-anaknya melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SKB 01-UM.09.30,N0 42 wajib memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI.

Selaras dengan perkembangan situasi di dalam negeri, pada bulan Juni pada tahun 1969 SCUT dibubarkan dan fungsinya diambil alih BAKIN. Melalui Keputusan KABAKIN N0.Kpts-031 Tahun 1973, dibentuklah Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang tugas utamanya mengawasi seluruh gerak-gerik dan kegiatan etnis Cina di Indonesia, sedangkan BKUT dialihkan ke Departemen Dalam Negeri. Melalui Keputusan KABAKIN N0-Kpts-032 tahun 1973, ditentukanlah struktur organisasi, prosedur dan tata cara kerja BKMC. Presiden Soeharto mengutamakan penekanannya terhadap kaum Cina kerana tuduhan simpati mereka terhadap pihak komunis. Beliau melarang penggunaan tulisan bahasa Cina dan menutup semua pertumbuhan kebudayaan Cina. Pada tahun 1970 Presiden Soeharto melarang pelajar mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan rasial.¹⁶

Presiden Soeharto, selanjutnya, memerintahkan militer untuk mengekang media massa. Presiden Soeharto juga memainkan politik adu domba antarfaksi-faksi dalam militer agar mau berpihak kepadanya bukan lagi pada rakyat. Ia juga mendukung kelompok Nasionalis, dan kemudian, mendukung unsur-unsur Islam.

¹⁶ Andika, "Tindakan Ketertiban Baru yang menindas," <http://ms.wikipedia.org/wiki/Soeharto>, diakses tanggal 4 April 2007.

Pada 1973, Soeharto memenangi pemilihan umum dan dipilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Beliau mengubah Undang-undang Pemilihan Umum dengan mengizinkan hanya tiga buah partai yang boleh mengikuti Pemilihan Umum, termasuk partinya sendiri, Golkar. Oleh karena itu, semua partai Islam diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, partai-partai bukan Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Pada 1975, atas permintaan Amerika dan Australia, Presiden Soeharto memerintahkan pasukan Indonesia memasuki Timor Timur, bekas jajahan Portugal. Setelah Portugal mundur, gerakan Fretilin telah memegang kuasa dan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat Timor Timur. Amerika merasa kuatir atas permintaan campur tangan Kesatuan Soviet oleh Fretilin. Kemudian, pada 15 Juli 1976, Timor Timur menjadi sebuah wilayah Indonesia sampai dialihkan ke PBB pada tahun 1999.¹⁷

Rasial menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980, sebuah kelompok yang lebih dikenali sebagai kelompok "*Petisi 50*" menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari Purnawirawan TNI, politisi, akademisi, dan mahasiswa. Harian Umum Media Indonesia menapiskan beritanya dan pemerintah Orde Baru menangkap penandatanganannya. Pada tahun 1984, kelompok ini menuduh bahwa Soeharto

¹⁷ *Ibid.*

menciptakan negara satu partai, kemudian beberapa pemimpinnya dipenjarakan.

Setelah Peristiwa Malari pada tahun 1974 yang meminta korban cukup banyak etnis Cina yang tidak berdosa, beberapa orang mantan pimpinan LPKB merasa khawatir melihat perkembangan situasi kondisi perbedaan antara yang kaya dan miskin, di Indonesia, semakin dalam dan menjurus ke arah rasialisme. Dengan dukungan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin pada bulan Agustus 1974, mereka mendirikan Badan Pembina Kesatuan Bangsa (BPKB). Namun, dalam perkembangannya, badan ini tidak memainkan peran yang menonjol.

Pada bulan Juli 1977, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan suatu konferensi nasional di Jakarta. Pesertanya para "tokoh" Cina se-Indonesia bersama dengan para pejabat kesatuan bangsa. Konferensi yang pada mulanya bernama Pekan Komunikasi Warga Negara Keturunan Asing Cina, kemudian diubah menjadi Pekan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Para peserta, pada akhir konferensi, mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan keinginan mereka akan kesatuan nasional dan mengusulkan pembentukan sebuah forum komunikasi dan konsultasi, sehingga terjalin kerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kesatuan nasional.

Menindak lanjuti masalah Cina yang tetap menjadi "bom waktu" yang setiap saat dapat meledak, pemerintah, khususnya, Departemen Dalam Negeri menyetujui pembentukan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan

Bangsa (Bakom-PKB). Bakom-PKB dibentuk pada 18 Oktober 1977 dan mendapat pengakuan resmi dari Menteri Dalam Negeri, yang menjadi pelindungnya, pada tanggal 31 Desember 1977.

Sebagian besar pimpinan Bakom-PKB adalah mantan aktivis LPKB. Ketua Umum Bakom-PKB K.Sindhunatha. Tokoh LPKB lainnya, Junus Jahya, sejak bulan Januari 1981, menjadi bendaharanya..Walaupun secara resmi Bakom-PKB bukan sebuah institusi pemerintah, dalam prakteknya organisasi ini berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Bakom-PKB tidak mempunyai keanggotaan yang luas dan kegiatannya sebagian besar dibiayai pemerintah bersama-sama dengan donasi para pengusaha Cina. Bakom-PKB menyebarkan gagasannya melalui majalah "Pembauran". Yang berbeda dengan LPKB, Bakom-PKB lebih menekankan agama Islam sebagai alat untuk melakukan asimilasi. Tetapi Bakom-PKB bukan sebuah organisasi front Islam. Anggotanya terdiri dari berbagai macam agama dan aliran politik. Ketua umumnya K.Sindhunatha adalah seorang Katholik dan anggota pengurus lainnya, Kwik Kian Gie, adalah seorang pemeluk agama Budha. Dengan terbentuknya Bakom-PKB lengkaplah sudah kontrol dan pemasangan terhadap etnis Cina oleh pemerintah Indonesia.

Dalam pengembangan doktrin asimilasi, tidak dapat dimungkiri media massa memegang peranan yang penting. Pada 1934 ketika Kwee Hing Tjiat secara berturut-turut menampilkan editorial yang berjudul "*Asimilasi*" terjadi banyak reaksi dari para pembacanya. Banyak yang mengirim surat protes, bahkan ada yang mengirim blangkon batik, ikat kepala batik, peci dan

surat kaleng. Padahal, artikel tersebut tidak menganjurkan ganti nama, ganti agama, dan sebagainya. Artikel tersebut mengupas keadaan masyarakat peranakan Cina dan perlunya sebagai golongan yang menyatukan diri dengan rakyat Indonesia.

Demikian juga munculnya doktrin dan gerakan asimilasi, yang kemudian berkembang menjadi LPKB, diawali dengan terjadinya polemik yang ramai di antara sekelompok peranakan Cina dalam mencari solusi masalah minoritas Cina sebagai kelanjutan dari pelaksanaan PP.10/1959 di dalam majalah Star Weekly terbitan 13 Februari sampai 25 Juni 1960. Di antaranya, adalah sejumlah tulisan Siauw Giok Tjhan yang menjelaskan idenya, yaitu konsep integrasi etnis Cina dalam perjuangan mencapai masyarakat sosialis Indonesia yang bersih dari segala bentuk diskriminasi. Disusul dengan tulisan Yap Thiam Hien yang menjelaskan konsep integrasi, tetapi tanpa harus mencapai masyarakat sosialis sesuai dengan ide komunis dan berbagai tulisan para pendukung doktrin asimilasi, antara lain tajuk rencana majalah Star Weekly yang dipimpin Auwjong Peng Koen dan tulisan Ong Hok Ham, Lauwchuantou dan pendukung asimilasi lainnya.

Di masa Orde Baru, seluruh media massa pendukung doktrin integrasi ditutup. Demikian juga harian-harian dan majalah-majalah berbahasa Cina dilarang terbit. Untuk melakukan pembinaan terhadap etnis Cina dari kalangan totok, pemerintah menerbitkan satu-satunya harian berbahasa Cina, yaitu "Harian Indonesia" yang berada di bawah kendali BKMC-BAKIN.

Demikian juga, di bawah koordinasi Bakom-PKB, TVRI dengan rajin menayangkan kisah-kisah yang bertema asimilasi atau pembauran. Untuk menunjang doktrin asimilasi atau pembauran, banyak diproduksi film-film layar lebar bertemakan kawin campur dan sebagainya. Sayangnya baik dalam tayangan TVRI maupun dalam film-film layar lebar tersebut, etnis Cina selalu diposisikan sebagai golongan yang egois, eksklusif, dan menolak melakukan pembauran. Secara sistimatis, masyarakat *dicekoki stereotip* bahwa etnis Cina adalah mahluk “menjijikkan” yang asosial, rakus, tamak, tidak peduli kepada masyarakat di sekelilingnya, dan hanya mencari keuntungan saja. Hal ini, sangat berbeda dengan tema film-film dan cerita-cerita sandiwara pada masa kolonial sebelum lahirnya Republik. Demikian pula halnya dengan tema-tema cerita pembauran dalam sastra Melayu Cina yang dimuat di media massa pada masa itu, di sajikan demikian baiknya, sehingga berhasil mendorong terjadinya pembauran di masyarakat..

Peranan dan pengaruh media massa ini memang, sangat ampuh, sehingga di masa Orde Baru aksi-aksi anarkis anti-Cina berulang-ulang terjadi dengan “kualitas” yang semakin meningkat. Peristiwa Malari, Solo-Semarang, Bandung, Makassar, Tasikmalaya, Rengasdengklok dan lain-lainnya, yang mencapai puncaknya dalam Peristiwa 13-15 Mei 1998 di Jakarta.

Selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru, doktrin asimilasi dalam segala bidang secara intensif telah dilaksanakan. Indoktrinasi ideologi negara secara nasional dilakukan oleh Badan Pembinaan Pendidikan

Pelaksanaan P4 (BP-7), yang secara intensif mengadakan panataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Eka Prasetya Panca Karsa. Untuk kalangan militer, dilaksanakan melalui kursus-kursus Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Bahan-bahan indoktrinasi yang diajarkan bertujuan mensakralkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa, semua bidang kehidupan masyarakat baik politik, budaya, pendidikan, maupun sosial dan sebagainya diseragamkan dan perbedaan diharamkan. Masalah Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA) menjadi masalah yang tabu untuk dibicarakan. Seolah-olah hal tersebut menjadi momok yang harus dihindari. Namun, korupsi, kolusi, dan nepotisme dibiarkan berkembang dengan subur.

Berbagai konflik horisontal antaretnis dan agama seperti di Jawa (Situbondo, Pekalongan, Rengasdengklok), Kalimantan Barat (Sanggau Ledo dan Sambas), Kalimantan Tengah (Sampit), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku (Ambon dan Maluku Utara), Lombok (Mataram), NTT (Kupang), Papua (Merauke) berlangsung tanpa henti-hentinya dan telah meminta korban. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan menderita luka, dan puluhan ribu rumah, toko dan tempat usaha lainnya hangus terbakar.

Sebab utama kegagalan pelaksanaan doktrin asimilasi karena doktrin ini adalah doktrin yang melanggar HAM dan bertentangan dengan kebijaksanaan para *founding fathers* Indonesia yang dengan cermat telah dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, dan ras dengan berbagai ragam budaya, agama, kepercayaan, dan

tradisinya, maka Bhinneka Tunggal Ika telah dijadikan semboyan negara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural (majemuk). Justeru, di sinilah letak kebesaran dan kekuatan bangsa ini. Adalah sesuatu yang mustahil menyatukan keanekaragaman ini. Dengan cara pemaksaan seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Bagaimana mungkin budaya, agama, dan kepercayaan etnis Cina yang telah berusia ribuan tahun harus dileburkan dalam kebudayaan lokal yang usianya baru ratusan tahun saja. Selama pemerintahan Orde Baru, dengan dibantu LPKB orang-orang Cina telah dipaksa untuk membaaur dengan mengganti namanya, dengan larangan melakukan upacara-upacara keagamaan, kepercayaan, budaya dan tradisinya secara terbuka. Bahasa dan aksaranya dilarang. Hasilnya adalah berbagai kerusuhan anti Cina.

Sekalipun WNI keturunan Cina diakui hak hidupnya oleh pemerintah Orde Baru dan istilahnya diperlunak menjadi 'Nonpri', memperoleh kembali kebebasan bergerak di sektor ekonomi, disektor-sektor lainnya, kesempatan itu kecil sekali. Dalam karier di ABRI ataupun menjadi Pegawai Negeri, kesempatan itu kecil. Apalagi memang dari kalangan keturunan sendiri dorongan untuk memasukinya juga kecil. Sempitnya kesempatan itu juga terjadi pada Sekolah Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri. Porsi untuk nonpri dibatasi. Situasi di atas mendorong semakin banyak orang Cina bergerak dalam sektor bisnis, dan semakin dominanlah mereka dalam sektor tersebut. Kurangnya kesempatan masuk di Sekolah Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri tidak menghalangi kemajuan pendidikan nonpri sebab sekolah-

sekolah swasta yang berbasis agama atau tidak memberikan peluang cukup kepada nonpri untuk menambah ilmu. Hanya sekarang, timbul lagi masalah baru karena umumnya sekolah-sekolah swasta, kemudian, banyak diisi oleh mayoritas siswa atau mahasiswa nonpri. Masalah rasial muncul kembali dalam bentuk baru sebagai konsekwensi pertumbuhan ekonomi secara bebas yang dianut pemerintah Orde Baru, yang kemudian berkembang sebagai masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan).

Catatan hak asasi manusia Presiden Soeharto juga semakin buruk dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993, Hak Asasi Manusia PBB mengajukan resolusi tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia yang serius di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden Amerika Bill Clinton mendukung resolusi tersebut.

Pada tahun 1996, Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati dari arena politik di Indonesia. Perubahan sosial politik di Indonesia antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 berjalan demikian cepat. Sebagai akibat situasi di Jakarta pada bulan Mei 1998, apalagi didukung dengan aksi mahasiswa Indonesia, maka pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi peralihan kekuasaan dari rezim Orde Baru Soeharto kepada rezim Reformasi. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto.

Pada tanggal 13-15 Mei 1998 di Jabotabek dan Solo menjelang runtuhnya rejim Orde Baru telah terjadi kerusuhan anti Cina yang terbesar sepanjang masa berdirinya Republik Indonesia. Terbesar bukan saja dalam kuantitas, tetapi juga dalam kualitas. Terjadi penjarahan, pengrusakan dan

pembakaran puluhan ribu bangunan toko, tempat tinggal, ruko, super market, mall, pabrik, kendaraan roda empat dan roda dua milik etnis Cina yang menjadi korban tanpa mendapatkan perlindungan sedikit pun dari aparat keamanan. Bahkan, telah terjadi aksi perkosaan dan pelecehan seksual terhadap puluhan perempuan Cina yang tidak berdaya membela diri. Berkat kemajuan teknologi, seluruh kejadian yang biadab dan memalukan bangsa ini disaksikan oleh jutaan pemirsa TV di seluruh penjuru dunia.

Kelompok etnis Cina merupakan langganan sasaran kambing hitam manuver suksesi berdarah rezim politik. Sejak zaman revolusi, dari peristiwa Tangerang tahun 1946, rasialisme 10 Mei 1963, geger Solo dan Jawa Tengah tahun 1980 sampai dengan penjarahan Mei tahun 1998 golongan etnis Cina selalu menjadi sasaran empuk yang tidak berdaya.¹⁸

Tragedi Mei 1998, merupakan peristiwa memilukan yang tercatat sebagai mendung hitam dalam sejarah Indonesia. Tragedi Mei tidak hanya membawa banyak korban jiwa dan harta, tetapi luka tersebut telah menimbulkan rasa benci dan menipisnya kepercayaan antara satu kelompok terhadap kelompok lain. Tragedi Mei tahun 1998 berdampak semakin berlarut-larutnya krisis ekonomi. Ratusan pengusaha pergi ke luar negeri sekaligus membawa uang yang sangat banyak. Ratusan investor gagal menanamkan investasi di Indonesia. Hutang bangsa terus menumpuk dan kemiskinan semakin mengikat Rakyat dan Negara ini. Oleh karena itu, tragedi Mei tahun 1998 adalah visualisasi dan pengejawantahan kegagalan

¹⁸ Sinar Harapan, "Konflik Agama Ancaman Serius di Indonesia," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0702/22/nas01.html>, diakses tanggal 5 April 2007.

sistem pembauran atau asimilasi etnis Cina, dan menimbulkan luka berkepanjangan yang dialami oleh bangsa ini.

Pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, banyak terjadi kerusuhan yang disebabkan konflik antara pribumi dengan etnis Cina. Pemerintah terkadang “mengadu domba” antara pribumi dengan etnis Cina. Contohnya, adalah kerusuhan di Kalimantan Barat yang sudah sering terjadi. Kedua etnis pendatang, yaitu Melayu dan Cina sudah ada di Kalimantan Barat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan, etnis Melayu sekitar lima ratus tahun yang lalu sudah mendirikan Kesultanan turun temurun di Kalimantan Barat. Pernah terjadi peristiwa mangkok merah dimana suku Daya menghadapi penduduk keturunan etnis Cina. Peristiwa tersebut tidak murni friksi etnis, tetapi sudah masalah politis. Pada waktu itu, suku Daya membantu tentara dalam menumpas Gerakan Paraku. Pendukung gerakan itu kebanyakan, adalah penduduk etnis Cina dari Malaysia. Dengan tujuan mengisolasi gerakan paraku, tentara menggosok orang Daya agar mengusir penduduk keturunan etnis Cina dari daerah pedalaman. Terjadilah pembantaian penduduk keturunan etnis Cina di pedalaman. Sejak itu, penduduk keturunan etnis Cina pindah dari daerah pedalaman ke daerah pesisir.¹⁹

Seiring dengan transformasi sosial masyarakat etnis Cina, khususnya, paruh kedua abad ke-20, tipologi ruko-ruko Cina di Indonesia banyak berganti wajah. Diduga pula, selain wajahnya, juga banyak hal yang berganti

¹⁹Noordin Salim, “Hubungan Daya, Melayu, Keturunan Cina,” <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/16/0132.html>, diakses tanggal 4 April 2007.

dari ruko abad ke-19. Komunitas pecinan adalah komunitas hidup yang dinamis sehingga wajah fisiknya bisa berganti dengan relatif cepat. Hal ini juga banyak dipengaruhi politik asimilasi Orde Baru yang menganggap identitas kecinaan sebagai *Other*. Pemerintah Orde Baru secara aktif, sejak awal, telah menciptakan citra marjinal bagi pecinan dan kebudayaan etnis Cina dalam peta kebudayaan nasional. Hal ini didukung dengan “formulasi” arsitektur Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan bangunan ibadat (dari lima agama resmi) dan rumah tradisional Indonesia (dari 27 provinsi) yang tentu saja tidak menampilkan kelenteng dan ruko.

Hal ini berbeda dengan apa yang diidentifikasi negara tetangga Malaysia sebagai identitas nasional. Secara demografis, negara itu, populasi penduduk Cina-nya mencapai 35 persen dari total penduduk yang mayoritas Melayu. Tetapi, identitas nasional tentunya bukan permasalahan demografi semata, apalagi jika mengingat bahwa sesungguhnya tidak ada etnis yang dapat dikatakan mayoritas secara demografis di Indonesia.²⁰

Pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi krisis ekonomi, krisis birokrasi pemerintahan yang mempraktikkan KKN, konflik-konflik dan kekerasan di berbagai daerah, pertentangan antarpribumi dengan etnis Cina, tuntutan pemulihan kembali harga diri sebagai bangsa dan penegakan hukum serta gerakan-gerakan memerdekakan diri beberapa daerah. Akumulasi berbagai persoalan yang tak kunjung diselesaikan itu memuncak dengan jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

²⁰ *Ibid.*

C.2 Dibidang Sosial dan Budaya

Pemerintah Indonesia menyarankan kepada etnis Cina yang berada di Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia dengan melakukan perubahan nama, sehingga etnis Cina dapat memiliki dwi kewarganegaraan. Soekarno beranggapan bahwa dengan mengganti nama menjadi nama pribumi kesenjangan antara etnis Cina dengan pribumi dapat diminimalisasikan. Adanya dwi kewarganegaraan ini membuat identitas etnis Cina menjadi "tidak jelas".

Pada tanggal 13-15 Januari 1961 di Bandung, Ambarawa, diselenggarakan Seminar Kesadaran Nasional yang hasilnya mengeluarkan sebuah "Piagam Asimilasi" yang ditandatangani tiga puluh orang dari berbagai kota di Jawa, sebagian besar peranakan Cina, di antaranya adalah Kwik Hway Gwan, Lauwchuantu, dan Ong Hok Ham.

Piagam tersebut pada intinya menekankan bahwa syarat mutlak untuk mencapai suatu bangsa dengan masyarakat yang adil dan makmur serta negara yang kuat dan penuh dinamika, sehingga dapat menjalankan peranan wajar dalam dunia internasional sesuai dengan panggilan jaman, satu-satunya jalan ke arah pengejawantahan cita-cita tersebut adalah dengan proses asimilasi. Dalam hubungannya dengan masalah warga negara Indonesia keturunan Cina, asimilasi berarti masuk dan diterima orang-orang keturunan Cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia tunggal sedemikian rupa, sehingga akhirnya golongan semula yang khas tidak ada lagi.²¹

²¹ *Ibid.*

Konsekuensinya adalah meninggalkan golongan keturunan Cina dan tidak ingin mempertahankan golongan tersebut sebagai golongan. Negara harus menyambut asimilasi tersebut dengan menganjurkan dan melancarkan asimilasi secara meluas di kalangan masyarakat seluruhnya. Setelah menghasilkan Piagam Asimilasi, Lauwchunto dan kawan-kawannya mendirikan Panitia Penyuluhan Asimilasi untuk mencari dukungan yang lebih luas bagi gerakan tersebut, mengingat Baperki telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari Presiden Soekarno dan PKI. Untuk itu, pendekatan, terutama, ditujukan kepada pihak militer dan berhasil mendapatkan dukungan dari Menteri Pertahanan atau KASAB Jenderal. A.H. Nasution. Sebagai implementasi dukungan tersebut, dibentuk Urusan Pembinaan Kesatuan Bangsa (UPKB) yang didukung tentara. Badan Pembinaan Potensi Karya (BPPK), yang merupakan badan untuk mengimbangi front Nasional pada awal Agustus 1962 diresmikan di Jakarta.

Untuk melaksanakan doktrin asimilasi total dan menandingi serta menghambat pengaruh Baperki, pada tanggal 10-12 Maret 1963, hanya beberapa hari sebelum dimulainya Kongres Baperki, para pendukung doktrin asimilasi atas persetujuan Presiden Soekarno menyelenggarakan Musyawarah Asimilasi. Dalam musyawarah tersebut diumumkan lahirnya sebuah organisasi bernama Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) yang diketuai Ong Tjong Hai alias Kristoforus Sindhunatha, seorang Letnan Angkatan Laut dan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan Angkatan Darat.

Salah satu program utama LPKB adalah pelaksanaan asimilasi di segala bidang kehidupan secara serentak dengan titik berat pada asimilasi sosial. Asimilasi setidak-tidaknya dilaksanakan dalam lima bidang kehidupan, yaitu: asimilasi politik, asimilasi kulturil, asimilasi ekonomi, asimilasi sosial atau "campur gaul", dan asimilasi kekeluargaan (pernikahan). Kelima-limanya harus dilaksanakan dengan serentak dengan mempertimbangkan waktu, situasi dan kondisi yang sebaik-baiknya.

Dalam perkembangannya, LPKB menghadapi banyak kendala. Meskipun pada awalnya Presiden Soekarno telah menyatakan dukungannya kepada doktrin asimilasi, ia tetap memuji kebijakan-kebijakan Baperki seperti yang dinyatakannya di muka Kongres Baperki pada Maret tahun 1963. Apalagi setelah kejadian rasialis tanggal 10 Mei 1963, yang pada saat itu Baperki, karena peranannya membela hak-hak dan kepentingan etnis Cina, mendapatkan banyak simpati dari kalangan masyarakat Cina. Para tokoh LPKB merasa posisinya semakin tersisihkan dan terisolasi.

Untuk mengantisipasinya, LPKB melakukan pendekatan formal dengan pemerintah dan pada tanggal 18 Juli 1963, melalui Keputusan Presiden, LPKB, yang sekarang, merupakan singkatan dari Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa, ditempatkan di bawah Departemen Penerangan yang menterinya Roeslan Abdulgani.

Patut diketahui bahwa memasuki paruh kedua dekade 1960-an Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya, terutama Inggris, Australia, dan negara-negara yang tergabung dalam pakta pertahanan SEATO, berada

dalam puncak Perang Vietnam untuk membendung pengaruh komunis yang datang dari Utara. Perang dingin antara blok Barat atau Kapitalis dengan blok Timur atau Komunis juga sedang berada dalam masa kritis, Indonesia sendiri di bawah pimpinan Presiden Soekarno sedang mengobarkan konfrontasi untuk mengganyang proyek Nekolim Malaysia.

Di dalam negeri, Presiden Soekarno mengembangkan doktrin Nasakom untuk mempersatukan seluruh kekuatan revolusioner. Dalam situasi politik seperti ini, di tengah-tengah tarik-menarik perang dingin antara kekuatan blok Barat dan blok Timur, rupanya, tidak ada pilihan lain bagi pimpinan Baperki selain menyandarkan diri kepada Presiden Soekarno dan melaksanakan seluruh doktrinnya termasuk Nasakomisasi di dalam tubuh Baperki.

Pertentangan antara Baperki dengan doktrin integrasi dan LPKB dengan doktrin asimilasi total terus berkelanjutan dalam usahanya merebut pengaruh dan dukungan, baik dari etnis Cina sendiri maupun dari pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Dengan terjadinya Peristiwa G30S/PKI/1965, Baperki berhasil dihancurkan. LPKB dengan dukungan militer memainkan peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Cina di Indonesia. Selaras dengan terjadinya G30S, dimulai kampanye Sinophobia atau anti Cina yang luas disponsori oleh kekuatan asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat.

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, Perang Vietnam sebagai manifestasi perang dingin antara kubu negara-negara kapitalis Barat di bawah

pimpinan Amerika Serikat dan Inggris dengan kubu negara-negara Sosialis Eropa Timur dan Asia di bawah pimpinan Uni Soviet dan RRT sedang mencapai puncaknya. Terjadi tarik-menarik kedua kekuatan tersebut hampir di seluruh belahan dunia, mulai dari negara-negara Amerika Latin, Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia Timur sampai ke Asia Tenggara. Tidak ada satu negara pun di permukaan bumi ini yang terhindar dari pengaruh perang dingin. Dinas-dinas rahasia dari kedua belah pihak, seperti CIA dari Amerika Serikat, MI-6 dari Inggris, KGB dan GRU dari Uni Soviet sibuk melakukan subversi dan mengintervensi kebijaksanaan politik setiap negara, terutama negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Sejumlah negara kapitalis Barat dalam usahanya membendung pengaruh komunis dari Utara yang identik dengan RRT, sejak awal, telah melakukan kegiatan anti Cina, atau anti Cina untuk mengalihkan perhatian rakyat Indonesia dari kegiatan anti imperialisme Amerika-Inggris. Kegiatan utama mereka adalah melakukan propaganda anti Cina secara aktif dan intensif. Mereka berusaha mengalihkan opini rakyat Indonesia dengan menyatakan bahwa musuh bangsa dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah Cina yang berasal dari Utara yaitu RRT.

Pada tanggal 25-31 Agustus 1966, berlangsung Seminar Angkatan Darat ke II di SESKOAD Bandung di bawah pimpinan Mayor Jenderal Suwanto. Tujuan seminar tersebut untuk merumuskan kembali doktrin Angkatan Darat dan menetapkan peran politik dan program Angkatan Darat, mengingat telah terjadi berbagai perubahan politik yang signifikan sejak

Seminar Angkatan Darat ke I April 1965. Dalam Seminar tersebut di samping para ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, hadir juga DR. Lie Tek Tjeng yang mengajukan makalah mengenai masalah etnis Cina. Namun ternyata, Seminar tersebut tidak menanggapi makalah DR.Lie Tek Tjeng. Seminar tersebut hanya mengambil satu keputusan yang menyangkut masalah Cina, yaitu mengganti penggunaan sebutan Republik Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi Republik Rakyat Cina dan orang Cina.

Keputusan Seminar Angkatan Darat ke II ini nyata-nyata ditujukan untuk merendahkan martabat orang-orang etnis Cina di mata rakyat Indonesia, karena sebutan Cina bagi etnis ini, di Indonesia, berkonotasi penghinaan dan sangat merendahkan, "orang Cina" seperti sebutan "Inlander" bagi orang-orang pribumi di masa kolonial, atau "Nigger" bagi orang-orang Afro Amerika. Sebutan Cina hanya digunakan apabila seseorang ingin mengejek dan menghina orang etnis Cina.

Memang, semasa pemerintahan kolonial Belanda digunakan sebutan Cina yang berasal dari kata bahasa Belanda Chi'na yang mengacu kepada Cina kunciran. Namun, sejak Cina Hwe Koan berdiri pada tahun 1900 dan kesepakatan para tokoh pergerakan pada tahun 1928, sebutan Chi'na diganti menjadi Cina. Itulah sebabnya dalam Penjelasan UUD 1945, istilah yang digunakan adalah Cina dan bukan Chi'na. Keputusan politik yang dihasilkan Seminar Angkatan Darat ke II yang tidak ada kaitannya dengan tema seminar tersebut sengaja dibuat untuk memojokkan etnis Cina dengan tujuan membuatnya tidak berdaya sama sekali. Terbukti, tujuan tersebut mencapai

sasarannya. Kata Cina menjadi senjata yang sangat “ampuh” untuk membuat orang Cina tidak berdaya, baik secara politis maupun psikologis. Akibatnya dengan serentak seluruh instansi dan media massa menggunakan sebutan Cina dan Republik Rakyat Cina untuk menggantikan Tionghoa dan Republik Rakyat Tiongkok.

Masalah Cina merupakan salah satu pekerjaan berat bagi pemerintahan Orde Baru yang mulai beroperasi pada tahun 1966. Jumlah orang-orang Cina tergolong kecil dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia (hanya sekitar 1,5% saat itu), tetapi pengaruhnya terhadap ekonomi sangatlah besar karena sebagian besar ekonomi RI ditengarai aktornya dimainkan orang-orang Cina (sekitar 60-70%), padahal sebagian besar dari mereka tidak berstatus warga negara Indonesia dan nasionalisme ke-Indonesia-annya diragukan.²²

Istilah “asimilasi” sempat menjadi kata kunci setiap pemerintah membahas keberadaan etnis Cina atau warga keturunan Cina. Ini tidak terlepas dari sikap represif pemerintah Orde Baru terhadap WNI keturunan Cina. Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967, yang sangat membatasi kegiatan etnis Cina, menandai awal keterkungkungan keturunan Cina di Tanah Air ini. Pemerintah Indonesia, pada era tahun 1970-an, juga melarang kesenian Cina.²³

²² Natawijaya, “Pertumbuhan Ekonomi Orba,” <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/02/18/0048.html>, diakses tanggal 7 April 2007.

²³ Kompas, “China Town Makassar?,” <http://www.kompas.com/kompascetak/0303/18/daerah/179141.htm>, diakses tanggal 4 April 2007.

Sesuai dengan namanya, inpres tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Cina, sejak peraturan itu diberlakukan pemerintah, etnis Cina mengalami berbagai keterbatasan. Perayaan imlek dilarang, barongsai tidak boleh, organisasi atau paguyuban Cina juga dibatasi. Huruf-huruf atau lagu Cina juga tidak bisa sembarangan masuk dalam wilayah publik. Semua itu serba tidak boleh.²⁴

Etnis Cina, selama masa Presiden Soeharto, tidak dapat mengekspresikan eksistensinya dengan bebas. Sebelum Orde Baru, barongsai masih boleh ditampilkan. "Terakhir, seingat saya tahun 1960-an. Hal ini karena faktor politik," kata Jonatan, Ketua Yayasan Suaka Insan ini. Dahulu, setiap imlek atau perayaan Tahun Baru Cina, barongsai sering tampil di tempat-tempat keramaian. Setelah G30S/PKI/1965, ritual tersebut hilang. Sebenarnya masih terkadang masih ada, namun hanya boleh dilaksanakan di kelenteng. Barongsai menurut orang Cina dapat untuk menolak bala, namun umumnya dikeluarkan saat imlek agar masyarakat dapat merasakan kebahagiaan.²⁵

Pada masa Presiden Soeharto, sembahyang ala Konghucu dibatasi. Akhirnya, umat Konghucu bergabung ke wihara. Mestinya Konghucu ke kelenteng, bukan ke wihara karena wihara merupakan tempat ibadahnya umat Budha. Ini yang menyebabkan, di kelenteng, ada patung Budha. Semua itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengakui lima agama.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lampung Post, "Suara Kita Mulai Didengar," <http://www.lampungpost.com/cetak/cetak.php?id=2005092501153232>, diakses tanggal 3 April 2007.

Konghucu tidak termasuk karena antara agama Konghucu dan Budha dianggap ada kesamaan, masuklah patung-patung Budha tersebut ke kelenteng.²⁶

Antara kelenteng dan wihara, sebenarnya, berbeda. Di wihara, pada cemannya terdapat patung Budha, sedangkan di kelenteng terdapat patung yang bermacam-macam, antara lain Dewi Kwan Im Pho Sat (Dewi Avalokitesvara, dewi pengasih dan penyayang dan selalu menolong orang yang kesusahan) dan patung Dewa Kwan Kung (dewa yang jujur).

Prestasi Presiden Abdurrahman Wahid mencuat ketika secara damai berusaha mengeluarkan militer (TNI dan POLRI) dari dominasinya di panggung politik di Indonesia. Juga upayanya untuk menegakkan supremasi hukum. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah jenderal yang kebal hukum di jaman Presiden Soeharto dan Presiden Habibie dapat diajukan ke dalam proses-proses *pro justicia*.

Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2000 tentang Pencabutan Inpres No.14/1967 sangat berarti bagi etnis Cina. Keppres tersebut memberi kebebasan warga keturunan Cina beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Keppres ini juga memberi penegasan penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat-istiadat merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Dengan keppres yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Januari 2000 ini, warga keturunan Cina dapat

²⁶ *Ibid.*

penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat tanpa izin khusus.

Pasca Orde Baru, persisnya Januari tahun 2000, etnis Cina seperti mendapat kepercayaan besar. Saat itu, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2000 tentang Pencabutan Inpres No.14/1967. Selanjutnya, pemerintah memberikan kebebasan warga etnis Cina pun dapat merayakan imlek secara terbuka. Mereka juga diberikan hak libur untuk merayakan hari besar itu.

Hal tersebut membawa dampak yang membahagiakan para etnis Cina. Mereka merasakan kebebasan termasuk yayasan-yayasan etnis Cina dapat berkembang. Etnis Cina juga diberi kebebasan untuk berkomunikasi dalam bahasa Cina. Karena adanya keterbatasan penggunaan bahasa Cina pada masa Presiden Soeharto, etnis Cina yang ada di Indonesia jarang yang dapat berbahasa Cina, sehingga kursus bahasa Cina ikut berkembang di Indonesia.

Pada masa Presiden Gus Dur etnis Cina tidak lagi harus beribadah di wihara, mereka dapat beribadah dengan bebas di kelenteng. Adanya kebebasan tersebut membuat maraknya kelenteng didirikan di Indonesia. Etnis Cina pun tidak "takut-takut" lagi dalam merayakan hari besar keagamaan mereka.

Selain kebebasan tersebut, etnis Cina juga memperoleh kebebasan dalam mengutarakan pendapat. "Suara" mereka lebih dihargai sejak ada pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung. Bukan hanya tim sukses (TS), calon kepala daerah juga terkadang meminta pendapat etnis Cina dalam

membuat kebijakan. Hal tersebut pada masa Presiden Soeharto dan Presiden Habibie tidak terjadi.

Pada masa Presiden Gus Dur, menteri ada yang berasal dari etnis Cina seperti Mar'i Pangestu, dulu Kwik Kian Gie. Namun, pada masa ini, etnis Cina masih belum mendapat kesempatan yang sama dengan pribumi untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebenarnya, jika etnis Cina oleh pemerintah Indonesia diberikan kesempatan yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, etnis Cina dapat benar-benar cinta pada negara Indonesia. Hal tersebut telah diterapkan oleh negara Bangkok.

Presiden Megawati berusaha menghargai etnis Cina di Indonesia dengan menjadikan hari imlek sebagai hari libur nasional. Imlek tahun 2003 adalah yang pertama kali berstatus sebagai hari libur nasional (sebelumnya bersifat fakultatif), lewat Keppres nomor 19 yang dikeluarkan April tahun 2002. Selembar keputusan itu sekaligus menggambarkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengayomi kehidupan warganya yang multikultur.²⁷

Pengayoman ini patut disyukuri setelah selama puluhan tahun gerak warga negara Indonesia yang satu ini dilingkari oleh pembatasan-pembatasan akibat gejolak massa anti Cina setelah pemberontakan PKI tahun 1965. Trauma itu diwujudkan dalam kenyataan bahwa segala sesuatu yang berbau budaya Cina perlu dihilangkan atau dilebur dalam kebijakan asimilasi.

²⁷ Pikiran Rakyat, "Imlek dan Etnis Cina," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/03/02.htm>, diakses tanggal 4 April 2007.

Sejak tahun 2000, memang warga keturunan ini, dapat bebas merayakan upacara kepercayaannya tanpa sembunyi-sembunyi, seperti waktu zaman Orde Baru. *Liong* atau barongsai saat ini dapat diselenggarakan di mana-mana. Semua tak ingin tertinggal memanfaatkan imlek dari sisi bisnis. Suasana serba meriah misalnya, menghiasi sejumlah pusat perbelanjaan di sejumlah kota besar di Indonesia.

Perayaan tahun baru Cina tak lepas dari perhitungan "ras kuning" Asia ini tentang berputarnya siklus tahunan yang jumlahnya 13 bulan. Dalam kepercayaan etnis ini, dalam satu kali rotasi terdapat 12 bulan ditambah satu bulan lagi pada urutan ke-13. Sesuai dengan keyakinan orang Cina yang berpegang pada prinsip dualisme *Yin* dan *Yang*, yakni prinsip negatif dan positif atau laki dan perempuan yang saling mengisi dalam kehidupan hingga akhirnya melahirkan harmoni, maka tujuan akhir yang senantiasa diidamkan oleh masyarakat Cina adalah terciptanya harmonisasi kehidupan. Biasanya, saat tahun baru imlek digunakan untuk merenung dan merefleksikan harapan baru agar keseimbangan dalam kehidupan tercapai di tahun mendatang.

C. 3 Di Bidang Hukum

Di bidang hukum, pemerintah Indonesia mempermudah etnis Cina untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam sensus pada tahun 1920 di Indonesia, golongan peranakan Cina dinyatakan Belanda sebagai *Vreemde Oosterlingen* yang berarti orang-orang Asia yang asing. Secara hukum, Pemerintah Belanda menyatakan bahwa para keturunan Cina, di Indonesia, sebagai orang asing. Dengan demikian, warga etnis Cina berada dalam

"banci" politik, bahkan "banci" identitasnya. Dalam pandangan Dede, Orde Baru juga membuat kebijakan-kebijakan yang memojokkan peranakan Cina. Dalam istilah Ben, kebijakan ini adalah berupa "pembancian" karena para peranakan Cina ini menjadi bukan warga Cina, juga bukan warga Indonesia. Pembagian peran oleh Orde Baru tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya melanggengkan konstelasi politik yang ada.²⁸

Profesor Dr Benedict ROG Anderson dari Universitas Cornell (AS) dan Dede Oetomo dari Universitas Airlangga menyatakan bahwa etnis Cina Indonesia harus berjuang keras untuk menyatakan "cintanya" pada Indonesia mengingat bagaimana pihak pemerintah Orde Baru selalu menempatkan etnis Cina pada posisi yang tidak menguntungkan mereka. Demikian, yang mereka sampaikan dalam seminar yang berjudul "Cina dan Nasionalisme di Asia Tenggara", yang digelar Perkumpulan Kebangsaan Anti-Diskriminasi Gaya Nusantara.²⁹

Indonesia yang baru merdeka dan baru dirongrong pemberontakan "Madiun" cukup berat menghadapi masalah sebagian orang Cina yang terlihat lebih memihak Belanda pada jaman revolusi dan kemudian mereka tampak bersimpati kepada komunis pada waktu G30S. Peran mereka yang sangat besar itu mendorong pemerintah Orde Baru untuk segera mengambil tindakan. Konsulat dan Kedutaan RRC ditutup menyusul kecurigaan

²⁸ Benedict dan Dede, "Etnis Cina Indonesia," <http://www.budaya-Cina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=203>, diakses tanggal 4 April 2007.

²⁹ *Ibid.*

keterlibatan mereka pada G30S/PKI/1965, sehingga kemudian BAPERKI dinyatakan terlarang.

Keputusan Seminar Angkatan Darat ke II, kemudian dikukuhkan pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet RI No.SE-06/PresKab/6/1967 tanggal 20 Juni 1967 yang berisi instruksi untuk mengganti sebutan Republik Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi Republik Rakyat Cina dan orang Cina.

Sebelumnya, dengan alasan untuk mempercepat proses asimilasi, warga negara keturunan asing, khususnya orang Cina WNI dibantu dengan mengganti nama dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia. Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan No.127/U/KEP/12/1966 untuk mempermudah proses ganti nama tersebut jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 4 tahun 1961. Dengan prosedur baru tersebut, proses ganti nama tidak usah dilakukan di pengadilan dan diumumkan dalam Berita Negara, tetapi cukup dilakukan di kantor kabupaten atau kantor walikota dengan biaya tidak lebih dari 25 rupiah. Peraturan ini hanya berlaku sampai tanggal 1 Maret 1968 dan hanya berlaku bagi warga negara keturunan Cina. Diperkirakan, LPKB memainkan peranan penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang selama ini menjadi tujuan perjuangannya.³⁰

Pada tanggal 7 Juni 1967, Presidium kabinet mengumumkan akan segera membentuk Staf Khusus Urusan Tjina (SCUT) yang berada di bawah presidium untuk membantu Adam Malik yang bertanggung jawab dalam

³⁰ Kompas, "Jangan Permasalahkan Cina atau Cina," <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9908/21/daerah/jang19.htm>, diakses 3 Mei 2007.

penanganan kebijakan masalah Cina. SCUT dibentuk beberapa bulan kemudian (diumumkan melalui Keputusan Presiden tanggal 3 Agustus 1967), tetapi pada tanggal 5 Juni, G-5 KOTI terlebih dahulu membentuk Badan Kontak Urusan Tjina (BKUT), yaitu suatu badan yang akan menangani orang-orang Cina WNA dengan ketuanya Kolonel. Sukisman, seorang militer lulusan jurusan Sinologi Fakultas Sastra UI, yang sangat tertarik dan ahli dalam masalah Cina.

Pada tanggal 18 Juli 1967, LPKB dibubarkan dan tugasnya diambil alih oleh Departemen Dalam Negeri walaupun LPKB, sebenarnya sejak tahun 1963 telah resmi menjadi lembaga pemerintah. Pimpinan LPKB mau tidak mau harus menerima keputusan pemerintah Orde Baru yang mengambil alih tugas-tugas penyelesaian masalah Cina yang tidak boleh mengganggu program pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya. Pimpinan LPKB mengeluarkan pernyataan bahwa dari sudut strategi politik LPKB secara pokok telah mencapai sasaran, konsepsinya mengenai asimilasi telah menjadi kebijaksanaan Orde Baru yang harus dilaksanakan. Sebagai lembaga pemerintah yang berdiri sendiri, LPKB telah berhasil mencapai apa yang dicita-citakannya. Tetapi, memang, lebih baik kalau tugas-tugas selanjutnya diserahkan kepada departemen dalam negeri.

Pada tanggal 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa seluruh upacara keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina hanya boleh dirayakan di

lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Instruksi Presiden ini bertujuan melikuidasi pengaruh seluruh kebudayaan Cina termasuk kepercayaan, tradisi, adat istiadat, dan agamanya dan mendorong terjadinya asimilasi secara total sesuai dengan yang dicita-citakan LPKB. Inilah puncak dari pelanggaran HAM yang ditujukan kepada etnis Cina di Indonesia.

Orang-orang Cina, kemudian, pada tahun 1967 dianjurkan untuk mengganti namanya dengan nama Indonesia untuk memperkecil perbedaan antara WNI keturunan Cina dengan WNI asli. Sekalipun demikian, memang, tidak mudah bagi orang-orang Cina, yang secara tradisi budaya memiliki perasaan eksklusif dan superioritas untuk dapat menempatkan diri dalam konteks kemerdekaan. Apalagi, pada jaman Belanda diangkat sebagai warga negara hampir setingkat dengan Belanda dan dibuat lebih tinggi statusnya dari orang-orang pribumi. Lebih-lebih lagi mereka mempunyai keunggulan dalam perdagangan dan pendidikan menyebabkan program ganti nama seakan-akan hanya berganti baju dengan badan dengan bau yang sama pula.

Warga keturunan Cina masih mendapat perlakuan yang kurang adil pada saat Habibie ataupun pada saat Abdurrahman Wahid menjabat presiden. Contohnya, keharusan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI). Hendrawan, contohnya, pebulu tangkis yang sudah berkali-kali membela "Merah-Putih" merasa lelah karena dipingpong saat mengurus status WNI-nya. Baru, setelah Presiden Megawati turun tangan, masalah tersebut dapat diselesaikan.³¹

³¹ *Ibid.*

Presiden Megawati, selanjutnya, memberikan kesempatan kepada etnis Cina yang ingin menjadi warga negara Indonesia tanpa mempersulit prosedur untuk menjadi warga negara Indonesia. Presiden Megawati, juga, menghargai warga Cina yang telah berjasa pada Indonesia, seperti Hendrawan, pebulu tangkis Indonesia yang berasal dari etnis Cina.